



Article history:

Submitted: 02-09-2026

Received: 02-09-2026

Revised: 02-09-2026

Accepted: 03-09-2026

Analisis Program Corporate Social Responsibility pada Dimensi Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Petrokimia Gresik 2024

Nabilla Putri Marshanda, Endah Kurniawati

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

Corresponding Author: nabillaputrimarshanda@student.uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis substansi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik pada dimensi sosial dan lingkungan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2024. Berbeda dari studi yang berhenti pada kehadiran item pengungkapan, penelitian ini menilai kedalaman program melalui hierarki output–outcome–impact serta memetakannya pada GRI Standards dan Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menampilkan portofolio program yang luas, mencakup pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, K3, pengembangan kompetensi, efisiensi energi, pengelolaan air, pengendalian emisi, pengelolaan limbah, dan konservasi. Namun, keluasan topik belum diikuti kedalaman substansi yang merata. Pengungkapan lingkungan dan ketenagakerjaan relatif lebih terukur karena terikat kepatuhan operasional industri kimia, sedangkan sejumlah program sosial masih dominan pada narasi kegiatan dan output. Pemetaan pada GRI dan SDGs menunjukkan relevansi tujuan, bukan bukti pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa laporan keberlanjutan berfungsi sebagai instrumen pengelolaan pemangku kepentingan dan legitimasi organisasi. Mutu akuntabilitasnya ditentukan oleh indikator hasil, bukan semata kelengkapan program.

Kata kunci: TJSL; tanggung jawab sosial perusahaan; laporan keberlanjutan; GRI; SDGs; analisis isi; BUMN

ABSTRACT

This study examines the substance of PT Petrokimia Gresik's social and environmental responsibility programs as disclosed in its 2024 Sustainability Report. Rather than measuring the mere presence of disclosure items, the study assesses program depth using an output–outcome–impact hierarchy and maps the programs against the GRI Standards and the Sustainable Development Goals (SDGs). A qualitative case study with content analysis is employed. The findings show a broad program portfolio covering community empowerment, education, health, employment, occupational safety, competency development, energy efficiency, water management, emission control, waste management, and conservation. However, topical breadth is not matched by evenly distributed substance. Environmental and employment disclosures tend to be more measurable because they are tied to operational compliance in the chemical-fertilizer industry, whereas several social programs remain activity- and output-oriented. Alignment with the GRI and the SDGs indicates goal relevance rather than proven achievement of sustainable development targets. The study concludes that sustainability reporting functions as an instrument of stakeholder management and organizational legitimacy. Its accountability depends on result indicators, not merely on program completeness.

Keywords: corporate social responsibility; sustainability report; GRI; SDGs; content analysis; state-owned enterprise

PENDAHULUAN

Dalam literatur manajemen, tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas pelengkap di luar tujuan bisnis. Carroll (1991) menempatkan tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropis sebagai satu kesatuan yang harus dikelola secara bersamaan. Perspektif

tersebut kemudian berkembang menjadi pendekatan strategis. Perusahaan dinilai mampu menciptakan keunggulan bersaing apabila mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial melalui *creating shared value* (Porter & Kramer, 2011). Dengan demikian, *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan bagian dari pengelolaan pemangku kepentingan, bukan semata kegiatan amal.

Tuntutan tersebut semakin relevan bagi industri pupuk dan kimia. Aktivitas operasional pada sektor ini memiliki eksternalisasi yang relatif tinggi terhadap masyarakat, tenaga kerja, sumber daya alam, dan mutu lingkungan. Risiko operasional tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat sosial dan reputasional. Kegagalan mengelola dampak lingkungan atau hubungan dengan komunitas di sekitar wilayah pabrik dapat mengganggu kelangsungan operasi, penerimaan publik, dan legitimasi perusahaan. Oleh karena itu, pelaksanaan serta pengungkapan TJSL menjadi instrumen manajemen untuk menunjukkan akuntabilitas sekaligus menjaga *license to operate*.

Di Indonesia, pengintegrasian tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam praktik korporasi diperkuat oleh kerangka regulasi. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 menempatkan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari penerapan keuangan berkelanjutan bagi emiten dan perusahaan publik (OJK, 2017). Bagi BUMN, program TJSL bahkan memiliki payung tersendiri. Peraturan Menteri BUMN mensyaratkan program yang terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pendekatan bisnis perusahaan (KemenBUMN, 2021, 2023). Kerangka tersebut menegaskan bahwa mutu TJSL tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi dari kejelasan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan hasil.

Sejalan dengan penguatan regulasi, jumlah perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan di Indonesia meningkat. Namun, peningkatan kuantitas pelaporan belum tentu diikuti peningkatan kualitas substansi. Gunawan et al. (2022) menunjukkan bahwa praktik *sustainability reporting* di Indonesia masih cenderung menonjolkan informasi ekonomi dibandingkan kedalaman aspek sosial dan lingkungan. Sebrina et al. (2023) menemukan bahwa kualitas laporan keberlanjutan masih beragam; kejelasan, akurasi, dan reliabilitas pengungkapan belum merata. Tinjauan Hidayati (2023) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa riset pelaporan keberlanjutan di Indonesia masih didominasi pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan tingkat pengungkapan atau hubungan CSR dengan nilai perusahaan. Akibatnya, substansi program yang dijalankan perusahaan sering kali belum dianalisis secara memadai.

Kesenjangan antara kelengkapan laporan dan kedalaman substansi menjadi persoalan manajerial. Laporan keberlanjutan dapat berfungsi sebagai media akuntabilitas, tetapi dapat pula menjadi sarana legitimasi simbolik apabila yang ditampilkan hanya daftar kegiatan tanpa indikator hasil. Suchman (1995) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan persepsi bahwa tindakan organisasi dianggap pantas dan selaras dengan sistem norma yang berlaku. Dalam kerangka itu, pengungkapan TJSL dapat dipahami sebagai upaya perusahaan menyesuaikan diri dengan ekspektasi publik dan regulator. Sementara itu, *stakeholder theory* menekankan bahwa kelangsungan perusahaan bergantung pada kemampuannya merespons kepentingan pihak-pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi organisasi, termasuk karyawan, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan (Freeman, 1984). Kedua teori tersebut menuntut pembacaan yang lebih teliti: apakah program yang diungkapkan benar-benar merepresentasikan pengelolaan pemangku kepentingan, atau baru sebatas pemenuhan format pelaporan.

Salah satu perusahaan yang relevan untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah PT Petrokimia Gresik. Perusahaan ini merupakan BUMN pada industri pupuk dan kimia yang memiliki keterkaitan langsung dengan ketahanan pangan serta dampak sosial-lingkungan di wilayah operasionalnya. PT Petrokimia Gresik secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan yang memuat program pada bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, energi, air, emisi, limbah, dan konservasi (PT Petrokimia Gresik, 2024). Keberagaman program tersebut menunjukkan cakupan TJSL yang luas. Akan tetapi, keluasan cakupan belum otomatis mencerminkan kedalaman substansi. Analisis masih diperlukan untuk menilai bentuk program, ruang lingkup sasaran, keterkaitan dengan standar keberlanjutan, serta apakah pengungkapan telah bergerak dari *output* kegiatan menuju *outcome* dan *impact*.

Untuk memperoleh dasar analisis yang sistematis, penelitian ini menggunakan GRI Standards sebagai kerangka pemetaan topik sosial dan lingkungan (Global Reporting Initiative, 2021) serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai rujukan arah kontribusi pembangunan berkelanjutan

(United Nations, 2015). Penggunaan kedua kerangka tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa perusahaan telah mencapai target SDGs. Pemetaan hanya digunakan untuk menilai relevansi program terhadap isu keberlanjutan yang diakui secara internasional, kemudian dikontraskan dengan kedalaman bukti yang disajikan dalam laporan.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian kualitatif di bidang manajemen yang menelaah substansi program TJSL BUMN industri pupuk berdasarkan laporan keberlanjutan. Penelitian terdahulu lebih banyak mengukur luas pengungkapan atau menguji pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum menjelaskan bagaimana program dirancang, kepada siapa program ditujukan, dan sejauh mana laporan mampu menunjukkan hasil. Selain itu, penelitian yang secara khusus memetakan program sosial dan lingkungan perusahaan industri pupuk pada indikator GRI, lalu menilainya melalui hierarki *output–outcome–impact*, masih relatif terbatas. Celah tersebut menjadi dasar penelitian ini.

Kebaruan penelitian terletak pada pergeseran pertanyaan dari “apakah perusahaan mengungkapkan CSR?” menjadi “bagaimana substansi program TJSL diungkapkan dan dikelola sebagai bagian dari strategi pemangku kepentingan?” Fokus diarahkan pada Laporan Keberlanjutan PT Petrokimia Gresik Tahun 2024, dengan pemilahan dimensi sosial dan lingkungan serta penilaian kedalaman pengungkapan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menginventarisasi program, tetapi menafsirkan pengungkapan sebagai praktik manajemen legitimasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, ruang lingkup, dan kedalaman pengungkapan program TJSL PT Petrokimia Gresik pada dimensi sosial dan lingkungan. Secara lebih operasional, penelitian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana bentuk dan ruang lingkup program TJSL yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2024? Kedua, bagaimana kedalaman pengungkapan program apabila dinilai dari hierarki output, outcome, dan impact? Ketiga, bagaimana kesesuaian program dengan indikator GRI dan relevansinya terhadap SDGs, serta apa implikasinya bagi pengelolaan pemangku kepentingan dan legitimasi perusahaan?

Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkaya penerapan *stakeholder theory* dan *legitimacy theory* pada pembacaan laporan keberlanjutan BUMN industri sensitif lingkungan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam meningkatkan mutu pelaksanaan dan pengungkapan TJSL, khususnya dengan memperkuat indikator hasil program. Secara kebijakan, temuan penelitian diharapkan memberi masukan mengenai pentingnya membedakan kelengkapan pelaporan dari substansi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Konsep CSR dan TJSL dalam Perspektif Manajemen

CSR merujuk pada kewajiban perusahaan untuk mempertimbangkan dampak keputusannya terhadap pihak-pihak di luar pemegang saham. Carroll (1991) merumuskan tanggung jawab tersebut dalam empat lapis: ekonomi, hukum, etis, dan filantropis. Lapisan ekonomi dan hukum menjadi prasyarat kelangsungan usaha, sedangkan lapisan etis dan filantropis menandai pergeseran dari kepatuhan minimum menuju pengelolaan nilai sosial. Dalam ranah manajemen, rumusan itu penting karena menempatkan CSR sebagai objek keputusan manajerial, bukan sebagai aktivitas di pinggiran organisasi.

Perkembangan selanjutnya menekankan integrasi CSR ke dalam strategi. Porter & Kramer (2011) berargumen bahwa perusahaan dapat menciptakan *shared value* apabila mampu menghasilkan nilai ekonomi dengan cara menyelesaikan persoalan sosial yang terkait dengan rantai nilai bisnisnya. Pendekatan ini membedakan CSR strategis dari filantropi semata. Program sosial yang terhubung pada kompetensi inti perusahaan dinilai lebih berpeluang berkelanjutan dibanding bantuan yang terpisah dari model bisnis.

Pada konteks BUMN Indonesia, konsep tersebut dilembagakan melalui istilah TJSL. Program TJSL BUMN didefinisikan sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola, dengan prinsip terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pendekatan bisnis (KemenBUMN, 2021, 2023). Definisi regulatif itu sejalan dengan logika manajemen kinerja: program tidak cukup dilaksanakan, tetapi harus direncanakan, diawasi, dievaluasi, dan dilaporkan. Dengan

demikian, objek kajian penelitian ini bukan hanya “ada tidaknya CSR”, melainkan bagaimana substansi program diungkapkan sebagai bagian dari akuntabilitas manajerial.

Pelaporan Keberlanjutan dan Masalah Kualitas Pengungkapan

Elkington (1997) menempatkan kinerja perusahaan pada triple bottom line: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan keberlanjutan kemudian menjadi media untuk mengomunikasikan ketiga dimensi tersebut kepada pemangku kepentingan. Hahn & Kühnen (2013) merangkum bahwa literatur *sustainability reporting* membedakan 3 (tiga) isu utama, yaitu keputusan untuk menyusun laporan, luas pengungkapan, dan kualitas pengungkapan. Distingsi itu krusial. Perusahaan dapat menerbitkan laporan yang tebal tanpa menyajikan informasi yang andal, terbandingkan, dan berorientasi hasil.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa kuantitas pengungkapan tidak identik dengan mutu. Clarkson et al. (2008) menekankan pentingnya membedakan pengungkapan yang bersifat naratif-umum dari pengungkapan yang merefleksikan komitmen dan kinerja lingkungan secara lebih substantif. Brammer dan Pavelin (2008) juga menemukan bahwa kualitas pengungkapan lingkungan berkaitan dengan karakteristik perusahaan dan sensitivitas industri. Perusahaan pada sektor yang dekat dengan isu lingkungan cenderung menghadapi tekanan lebih besar untuk menyajikan informasi yang lebih bermutu.

Temuan pada konteks Indonesia mengarah pada pola yang serupa. Gunawan et al. (2022) menunjukkan bahwa jumlah laporan keberlanjutan meningkat, tetapi informasi ekonomi masih lebih menonjol dibanding kedalaman aspek sosial dan lingkungan. Sebrina et al. (2023) menilai kualitas laporan keberlanjutan belum merata, khususnya pada kejelasan, akurasi, dan reliabilitas. Hidayati (2023) menambahkan bahwa riset di Indonesia masih banyak berfokus pada determinan pengungkapan dan tautannya dengan nilai perusahaan, sehingga isi program relatif jarang dianalisis. Celah ini menjadi titik masuk penelitian: laporan dapat lengkap secara format, tetapi tipis secara substansi manajerial.

GRI Standards dan SDGs sebagai Kerangka Pemetaan

GRI Standards menyediakan taksonomi dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat (Global Reporting Initiative, 2021). Pada dimensi sosial, topik seperti ketenagakerjaan, keselamatan kerja, pelatihan, dan komunitas setempat menyediakan jangkar untuk mengidentifikasi program. Pada dimensi lingkungan, topik energi, air, emisi, limbah, dan keanekaragaman hayati menyediakan jangkar yang sama. Keunggulan GRI terletak pada keterbandingan antarsu. Kelemahannya muncul apabila peneliti atau perusahaan berhenti pada pelabelan topik tanpa menelaah kedalaman bukti.

SDGs menambahkan lapisan arah pembangunan global (United Nations, 2015). Pemetaan program perusahaan pada tujuan tertentu, misalnya SDG 3, 4, 8, 12, atau 13, berguna untuk membaca relevansi kontribusi. Namun relevansi tujuan tidak sama dengan pencapaian target. Kesalahan inferensi yang sering terjadi dalam studi CSR adalah menyamakan “program sejalan dengan SDG” dengan “perusahaan berkontribusi signifikan terhadap SDG”. Penelitian ini menolak penyamaan tersebut. GRI dan SDGs diposisikan sebagai kerangka pemetaan isu, bukan sebagai bukti kinerja.

Bagi BUMN, pemetaan itu juga beririsan dengan kewajiban pelaporan keberlanjutan dalam POJK 51/POJK.03/2017 (OJK, 2017). Regulasi mendorong perusahaan mengomunikasikan kinerja keberlanjutan, tetapi tidak secara otomatis menjamin bahwa setiap program yang dilaporkan memiliki indikator hasil. Karena itu, kerangka internasional perlu dilengkapi dengan kriteria penilaian kedalaman pengungkapan.

Hierarki Output, Outcome, dan Impact

Untuk membedakan kelengkapan topik dari substansi program, penelitian ini menggunakan hierarki *output–outcome–impact*. *Output* merujuk pada keluaran langsung kegiatan, misalnya jumlah pelatihan, jumlah penerima bantuan, atau instalasi perangkat pengendali emisi. *Outcome* merujuk pada perubahan jangka menengah pada penerima manfaat atau kinerja operasi, misalnya peningkatan kapasitas usaha, penurunan intensitas energi, atau perbaikan indikator kecelakaan kerja. *Impact* merujuk pada perubahan yang lebih luas dan bertahan, misalnya perbaikan kesejahteraan komunitas, pemulihan ekosistem, atau kontribusi terukur terhadap tujuan pembangunan.

Hierarki tersebut selaras dengan tuntutan regulasi TJSL BUMN yang menekankan keterukuran dampak (KemenBUMN, 2021). Dalam perspektif manajemen program, hierarki ini juga mencegah evaluasi yang berhenti pada realisasi kegiatan. Perusahaan dapat menampilkan portofolio program yang luas, tetapi jika pengungkapan terkonsentrasi pada *output*, maka laporan lebih dekat pada komunikasi aktivitas daripada akuntabilitas kinerja. Penggunaan hierarki ini menjadi pembeda penelitian. Banyak studi content analysis CSR menghitung kehadiran item GRI. Penelitian ini memakai GRI untuk memetakan isu, kemudian menilai setiap klaster program berdasarkan jenis bukti yang disajikan. Dengan cara itu, analisis bergerak dari inventarisasi menuju penilaian substansi.

Stakeholder Theory

Freeman (1984) menempatkan perusahaan dalam jejaring pemangku kepentingan. Kelangsungan organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham, tetapi juga oleh karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, komunitas, dan pihak lain yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi perusahaan. Dalam logika ini, TJSL merupakan mekanisme mengelola ketergantungan sumber daya dan harapan pihak eksternal maupun internal.

Implikasi manajerialnya bersifat selektif. Tidak semua pemangku kepentingan memperoleh perhatian yang sama. Perusahaan cenderung menonjolkan pihak yang memiliki kekuatan, legitimasi, atau urgensi terhadap operasi. Pada industri pupuk dan kimia, dua klaster yang paling mungkin menonjol adalah karyawan dan komunitas di sekitar pabrik, di samping regulator lingkungan. Karyawan terkait langsung dengan keselamatan proses dan kapabilitas produksi. Komunitas terkait dengan penerimaan sosial atas eksternalitas pabrik. Lingkungan, meskipun sering dikategorikan terpisah, pada dasarnya merupakan arena kepentingan publik dan negara. Dengan demikian, stakeholder theory tidak hanya dipakai untuk menyatakan bahwa “perusahaan peduli pada banyak pihak”. Teori ini dipakai untuk menafsirkan pola pengungkapan: program mana yang paling diuraikan, sasaran siapa yang paling terlihat, dan apakah pengungkapan merefleksikan pengelolaan hubungan strategis atau sekadar perluasan daftar kegiatan.

Legitimacy Theory

Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas pantas, patut, dan selaras dengan sistem norma, nilai, serta keyakinan sosial. Deegan (2002) menempatkan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai salah satu strategi organisasi untuk memperoleh, mempertahankan, atau memulihkan legitimasi. Ketika kesenjangan muncul antara nilai sosial dan perilaku organisasi, manajemen dapat merespons melalui perubahan operasi, perubahan persepsi, atau pengalihan perhatian publik.

Konsekuensi analitisnya penting. Laporan keberlanjutan dapat bersifat substantif apabila menampilkan bukti perubahan kinerja. Laporan yang sama dapat bersifat simbolik apabila menonjolkan label standar, jumlah program, dan narasi komitmen tanpa indikator hasil. Hahn & Kühnen (2013) mencatat bahwa *legitimacy theory* termasuk teori yang paling sering digunakan untuk menjelaskan motivasi pelaporan keberlanjutan. Namun, pada banyak studi, teori itu hanya disebut tanpa dioperasionalkan.

Penelitian ini mengoperasionalkan *legitimacy theory* melalui pembacaan kedalaman pengungkapan. Kelengkapan pemetaan GRI dan SDGs ditafsirkan sebagai sinyal keselarasan normatif. Kehadiran indikator outcome dan impact ditafsirkan sebagai upaya legitimasi yang lebih substantif. Sebaliknya, dominasi narasi output ditafsirkan sebagai risiko legitimasi simbolik. Posisi ini tidak menuduh perusahaan melakukan manipulasi, tetapi menempatkan laporan sebagai artefak manajerial yang perlu dibaca secara kritis.

Penelitian Terdahulu

Literatur internasional telah membedakan luas dan mutu pengungkapan (Clarkson et al., 2008; Brammer & Pavelin, 2008; Hahn & Kühnen, 2013). Literatur Indonesia menegaskan bahwa pelaporan meningkat secara kuantitas, tetapi kualitas substansi masih berkembang (Gunawan et al., 2022; Sebrina et al., 2023; Hidayati, 2023). Penelitian-penelitian tersebut memberi fondasi, tetapi menyisakan tiga keterbatasan yang relevan bagi bidang manajemen.

Pertama, dominasi pendekatan kuantitatif membuat program CSR sering direduksi menjadi skor pengungkapan. Skor berguna untuk perbandingan antarperusahaan, tetapi tidak menjelaskan

logika program, sasaran, dan jenis bukti yang disajikan. Kedua, kajian kualitatif berbasis laporan keberlanjutan pada BUMN industri pupuk masih terbatas. Padahal sektor ini memiliki kombinasi khas: mandat ketahanan pangan, risiko lingkungan industri kimia, dan kewajiban TJSL sebagai BUMN. Ketiga, pemetaan pada GRI dan SDGs sering berhenti pada kesesuaian label. Sedikit penelitian yang secara eksplisit menguji apakah label tersebut diikuti bukti *outcome* dan *impact*.

Keterbatasan itu menempatkan penelitian ini pada posisi berikut. Objeknya adalah substansi program TJSL pada dimensi sosial dan lingkungan PT Petrokimia Gresik sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2024. Alat bacanya adalah GRI, SDGs, dan hierarki kedalaman pengungkapan. Alat interpretasinya adalah *stakeholder theory* dan *legitimacy theory*. Hasil yang diharapkan bukan daftar program, melainkan penilaian apakah pengungkapan lebih dekat pada akuntabilitas kinerja atau pada komunikasi legitimasi.

Pengembangan Argumen dan Kerangka Analisis

Penelitian ini mengembangkan tiga argumen, diantaranya: argumen pertama, keluasan program TJSL merupakan kondisi perlu, tetapi bukan kondisi cukup bagi mutu pengelolaan keberlanjutan. Perusahaan industri sensitif lingkungan secara normatif dituntut menampilkan program pada dimensi sosial dan lingkungan. Namun, dari perspektif manajemen kinerja, yang menentukan mutu adalah apakah program memiliki sasaran jelas, indikator terukur, dan bukti perubahan.

Argumen kedua, pengungkapan lingkungan dan pengungkapan sosial berpotensi memiliki kedalaman yang tidak simetris. Dimensi lingkungan pada industri kimia lebih terikat pada kepatuhan operasional, perangkat teknis, dan indikator kuantitatif. Dimensi sosial, terutama program komunitas, lebih mudah jatuh pada narasi kegiatan. Apabila pola itu muncul, maka laporan tidak dapat disimpulkan “sudah komprehensif” hanya karena kedua dimensi disebut.

Argumen ketiga, pemetaan GRI dan SDGs harus dibaca sebagai sinyal relevansi isu, bukan sebagai bukti kontribusi pembangunan berkelanjutan. Semakin luas label yang digunakan tanpa diimbangi indikator hasil, semakin besar kemungkinan laporan berfungsi sebagai perangkat legitimasi simbolik (Deegan, 2002; Suchman, 1995). Sebaliknya, apabila program prioritas dilengkapi baseline, target, realisasi, dan evaluasi, pengungkapan lebih dekat pada pengelolaan pemangku kepentingan yang substantif (Freeman, 1984; Porter & Kramer, 2011).

Ketiga argumen tersebut merangkum kerangka analisis penelitian. Program dalam laporan diidentifikasi, diklasifikasikan pada dimensi sosial dan lingkungan, dipetakan pada GRI dan SDGs, lalu dinilai kedalamannya. Interpretasi akhir diarahkan pada implikasi manajerial: bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan karyawan, komunitas, dan lingkungan, serta bagaimana laporan digunakan untuk menjaga legitimasi organisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Tujuannya bukan mengukur luas pengungkapan secara statistik, melainkan menelaah substansi program TJSL dalam laporan perusahaan. Analisis dilakukan melalui content analysis agar pesan dalam teks dapat diidentifikasi, diklasifikasikan, dan ditafsirkan secara sistematis (Krippendorff, 2018). Sejalan dengan Hahn dan Kühnen (2013) serta Clarkson et al. (2008), yang dinilai bukan hanya kehadiran topik, tetapi mutu bukti yang menyertainya.

Objek penelitian adalah program TJSL dimensi sosial dan lingkungan dalam Laporan Keberlanjutan PT Petrokimia Gresik Tahun 2024. Kasus dipilih secara purposif karena tiga alasan: industri pupuk-kimia bersifat sensitif lingkungan (Brammer & Pavelin, 2008); sebagai BUMN, perusahaan terikat pada TJSL yang menuntut program terukur dan akuntabel (KemenBUMN, 2021, 2023); serta laporan 2024 memuat kedua dimensi tersebut (PT Petrokimia Gresik, 2024).

Data bersifat sekunder. Korpus utama adalah laporan 2024. Data pendukung meliputi GRI Standards (GRI, 2021), SDGs (United Nations, 2015), POJK 51/POJK.03/2017 (OJK, 2017), dan peraturan TJSL BUMN. Yang dinilai adalah substansi pengungkapan, bukan verifikasi pelaksanaan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Laporan dibaca utuh, program diidentifikasi, lalu dimasukkan ke matriks berisi sasaran, bentuk kegiatan, jenis bukti, serta tautan GRI dan SDGs. Unit analisis adalah program atau inisiatif yang dilaporkan, bukan kemunculan istilah “CSR” atau “TJSL”.

Analisis menempuh 5 (lima) tahap: identifikasi program; reduksi data; kategorisasi; pemetaan pada GRI dan SDGs; serta interpretasi kedalaman. Dimensi sosial meliputi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, K3, dan pengembangan kompetensi. Dimensi lingkungan meliputi energi, air, emisi, limbah, dan konservasi. Pemetaan GRI/SDGs diposisikan sebagai kerangka isu, bukan bukti capaian. Temuan kemudian dibaca melalui stakeholder theory dan legitimacy theory (Freeman, 1984; Suchman, 1995; Deegan, 2002).

Kedalaman dinilai dengan rubrik *output–outcome–impact*. *Output* merujuk pada kegiatan atau keluaran langsung; *outcome* pada perubahan jangka menengah; *impact* pada perubahan yang lebih luas dan bertahan. Program yang hanya berisi narasi komitmen dikategorikan di bawah *output*. Apabila terdapat beberapa tingkat bukti, penilaian mengikuti bukti tertinggi yang tertulis. Rubrik ini menguji 3 (tiga) argumen penelitian: keluasan tidak sama dengan substansi, kedalaman sosial dan lingkungan dapat timpang, dan label GRI/SDGs tidak otomatis menandai hasil. Kriteria ini juga selaras dengan tuntutan keterukuran dampak TJSL BUMN (KemenBUMN, 2021).

Keabsahan dijaga melalui audit trail, rujukan pada teks sumber, dan batas inferensi yang tegas. Triangulasi terbatas dilakukan dengan membandingkan kategori temuan terhadap GRI, SDGs, dan ketentuan TJSL/keuangan berkelanjutan. Karena tidak ada observasi lapangan, yang ditekankan adalah *confirmability proses coding*. Kategori disusun a priori, lalu diisi hanya oleh bukti yang tertulis. Metode ini tidak dimaksudkan untuk generalisasi. Hasil berlaku pada kasus dan periode laporan yang dikaji. Analisis dokumen juga tidak dapat memisahkan secara tuntas program yang belum berdampak dari program yang berdampak tetapi tidak diungkapkan secara memadai.

HASIL

Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 menampilkan portofolio TJSL yang mencakup pemangku kepentingan eksternal, pemangku kepentingan internal, dan pengendalian dampak operasi (PT Petrokimia Gresik, 2024). Keluasan itu sejalan dengan tuntutan triple bottom line (Elkington, 1997) serta mandat TJSL BUMN yang menempatkan program sebagai bagian dari pendekatan bisnis (KemenBUMN, 2021). Namun, sesuai distingsi Hahn & Kühnen (2013) serta Clarkson et al. (2008), kelengkapan topik belum dapat disamakan dengan mutu bukti. Berikut ini adalah pemisahan bentuk program, kedalaman pengungkapan, dan makna pemetaan GRI/SDGs. Tabel 1 menjelaskan dimensi sosial mencakup 2 (dua) klaster sasaran. Klaster komunitas meliputi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Klaster karyawan meliputi ketenagakerjaan, K3, serta pengembangan kompetensi.

Tabel 1
Program TJSL pada Dimensi Sosial

Aspek	Bentuk program yang diungkap	Sasaran	GRI	Kecenderungan kedalaman
Pemberdayaan masyarakat	Penguatan UMKM, peningkatan kapasitas ekonomi, program berbasis komunitas/pertanian	Masyarakat, kelompok rentan	413	Output dominan; outcome potensial pada program unggulan
Pendidikan	Dukungan akses dan mutu pendidikan	Pelajar/masyarakat	413	Output
Kesehatan	Dukungan layanan dan kegiatan kesehatan	Masyarakat	413	Output
Ketenagakerjaan	Perlindungan dan kesejahteraan pekerja	Karyawan	401	Kebijakan–output
K3	Sistem manajemen dan pelatihan K3	Karyawan	403	Output; outcome jika indikator keselamatan disajikan
Kompetensi	Pelatihan dan sertifikasi	Karyawan	404	Output

Sumber: data olahan PT Petrokimia Gresik (2024) dan Global Reporting Initiative (2021).

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pemberdayaan, pengungkapan menampilkan pergeseran dari bantuan langsung menuju penguatan kapasitas. Program yang menautkan komunitas pada ekosistem pertanian atau rantai pasok perusahaan mendekati logika creating shared value (Porter & Kramer, 2011). Pendidikan dan kesehatan memperluas cakupan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi bukti yang paling sering muncul adalah jenis kegiatan, bukan perubahan kondisi penerima manfaat.

Pada sisi internal, ketenagakerjaan, K3, dan pelatihan menempatkan karyawan sebagai pemangku kepentingan strategis. Untuk industri kimia, pola ini masuk akal secara manajerial:

keselamatan kerja terkait langsung dengan kelangsungan operasi. Temuan tersebut mendukung stakeholder theory bahwa perusahaan menonjolkan pihak yang paling memengaruhi dan dipengaruhi aktivitas organisasi (Freeman, 1984).

Tabel 2 menjelaskan dimensi lingkungan menampilkan 3 (tiga) lapis pengelolaan: efisiensi input, pengendalian proses, dan pemulihan.

Tabel 2
Program TJSL pada Dimensi Lingkungan

Aspek	Bentuk pengelolaan yang diungkap	GRI	Kecenderungan kedalaman
Energi	Efisiensi dan pengelolaan konsumsi energi	302	Output–outcome jika intensitas disajikan
Air	Efisiensi dan tata kelola air	303	Output–outcome jika intensitas disajikan
Emisi	Pengendalian dan pemantauan, termasuk perangkat teknis	305	Output teknis; outcome jika tren emisi disajikan
Limbah	Pengelolaan limbah B3 dan non-B3	306	Output–kepatuhan
Konservasi	Penghijauan, rehabilitasi, restorasi ekosistem	304	Output; impact hanya jika perubahan ekosistem diukur

Sumber: data olahan dari PT Petrokimia Gresik (2024) dan Global Reporting Initiative (2021).

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pola tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan diperlakukan sebagai bagian operasi, bukan semata kegiatan seremonial. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa sektor sensitif lingkungan menghadapi tekanan lebih besar untuk menampilkan pengungkapan yang lebih teknis (Brammer & Pavelin, 2008). Meski demikian, kehadiran perangkat pengendali atau kegiatan konservasi baru berada pada tingkat output apabila tidak disertai perubahan kinerja yang terukur.

Hasil penilaian rubrik menunjukkan ketimpangan kedalaman. Program ketenagakerjaan dan lingkungan operasional relatif lebih dekat pada logika kinerja karena terikat kepatuhan industri. Sebaliknya, sejumlah program sosial komunitas masih terkonsentrasi pada narasi kegiatan. Pendidikan dan kesehatan, misalnya, penting secara normatif, tetapi pengungkapannya belum secara konsisten menampilkan perubahan akses, status kesehatan, atau kapasitas penerima manfaat.

Temuan ini mengonfirmasi argumen kedua penelitian. Dimensi lingkungan dan dimensi sosial tidak otomatis setara secara substansi. Ketimpangan itu juga sejalan dengan pola pelaporan keberlanjutan di Indonesia yang meningkat secara kuantitas, tetapi belum merata secara kualitas (Gunawan et al., 2022; Sebrina et al., 2023; Hidayati, 2023). Dari perspektif manajemen program, hierarki hasil yang dituntut regulasi TJSL BUMN belum sepenuhnya terlihat pada seluruh klaster pengungkapan (Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2021).

Perlu ditegaskan batas inferensi. Absennya outcome atau impact dalam laporan tidak membuktikan bahwa program gagal di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan adalah akuntabilitas tertulis belum merata. Dalam pembacaan Deegan (2002), kondisi itu membuka ruang interpretasi bahwa laporan berfungsi menjaga keselarasan normatif, sementara bukti perubahan masih selektif.

Tabel 3
Pemetaan Program pada GRI dan SDGs

Aspek	Dimensi	GRI	SDGs relevan	Makna pemetaan
Pemberdayaan masyarakat	Sosial	413	8	Relevansi kerja layak dan pertumbuhan ekonomi
Pendidikan	Sosial	413	4	Relevansi pendidikan bermutu
Kesehatan	Sosial	413	3	Relevansi kesehatan dan kesejahteraan
Ketenagakerjaan dan K3	Sosial	401, 403	8	Relevansi kerja layak
Pengembangan kompetensi	Sosial	404	4, 8	Relevansi kapasitas SDM
Energi	Lingkungan	302	7, 13	Relevansi energi bersih dan aksi iklim
Air	Lingkungan	303	6	Relevansi tata kelola air
Emisi	Lingkungan	305	13	Relevansi aksi iklim
Limbah	Lingkungan	306	12	Relevansi produksi bertanggung jawab
Konservasi	Lingkungan	304	15	Relevansi ekosistem darat

Sumber: data olahan dari PT Petrokimia Gresik (2024), Global Reporting Initiative (2021), dan United Nations (2015).

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pemetaan memperlihatkan cakupan yang luas: SDG 3, 4, dan 8 pada dimensi sosial; SDG 6, 7, 12, 13, dan 15 pada dimensi lingkungan. SDG 8 paling sering beririsan dengan program sosial karena mencakup pemberdayaan, ketenagakerjaan, dan kompetensi. Pola itu dapat dibaca sebagai orientasi manajerial pada produktivitas dan kemandirian, bukan semata bantuan jangka pendek.

Namun, sesuai argumen ketiga, kesesuaian label hanya menandai relevansi isu. Menautkan program pendidikan pada SDG 4 tidak membuktikan kontribusi signifikan terhadap pendidikan bermutu. Demikian pula menautkan efisiensi energi pada SDG 13 tidak sama dengan pencapaian target iklim. GRI berguna untuk mengidentifikasi topik; SDGs berguna untuk membaca arah kontribusi; keduanya tidak menggantikan indikator hasil.

Secara *stakeholder theory*, perusahaan tampak mengelola dua pusat gravitasi. Komunitas dijaga untuk mempertahankan penerimaan sosial di sekitar wilayah operasi dan, pada program tertentu, menautkan penerima manfaat pada ekosistem bisnis. Karyawan dijaga untuk mengamankan kapabilitas dan keselamatan produksi. Lingkungan berfungsi sebagai arena kepentingan publik sekaligus syarat kepatuhan operasi (Freeman, 1984).

Secara *legitimacy theory*, kelengkapan topik GRI dan label SDGs memperkuat kesan keselarasan dengan norma global dan regulasi domestik (Suchman, 1995; Deegan, 2002). Strategi itu sah secara manajerial. Risikonya muncul apabila pemangku kepentingan mulai menuntut bukti *outcome*. Pada titik itu, legitimasi bergeser: persoalan bukan lagi “apakah perusahaan memiliki TJSL?”, melainkan “apakah TJSL mengubah sesuatu?”

Implikasi praktis. Manajemen perlu memperlakukan program prioritas sebagai objek kinerja: baseline, target, realisasi, dan evaluasi. Tanpa itu, fungsi strategis TJSL mundur menjadi komunikasi reputasi. Temuan ini juga mempertegas kontribusi penelitian terhadap literatur Indonesia: masalah utamanya bukan ketiadaan program pada BUMN industri pupuk, melainkan ketimpangan substansi antarprogram dalam laporan keberlanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menelaah substansi program TJSL PT Petrokimia Gresik pada dimensi sosial dan lingkungan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan telah menampilkan portofolio program yang terstruktur. Dimensi sosial mencakup pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, K3, dan pengembangan kompetensi. Dimensi lingkungan mencakup energi, air, emisi, limbah, dan konservasi. Program tersebut relevan dengan indikator GRI serta SDG 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, dan 15.

Temuan analitis utamanya bukan pada kelengkapan program, melainkan pada ketimpangan substansi. Pengungkapan lingkungan dan ketenagakerjaan relatif lebih dekat pada logika kepatuhan serta kinerja operasi. Sebagian program sosial komunitas masih terkonsentrasi pada output. Pemetaan GRI dan SDGs menandai relevansi isu, bukan capaian pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, laporan berfungsi ganda: sebagai media akuntabilitas sekaligus sebagai perangkat legitimasi.

Secara teoretis, temuan mempertegas bahwa *stakeholder theory* dan *legitimacy theory* tidak cukup dipakai untuk menyatakan keselarasan normatif. Kedua teori menjadi produktif apabila dioperasionalkan melalui penilaian kedalaman bukti. Keluasan label keberlanjutan dapat menjaga legitimasi jangka pendek, tetapi tidak menggantikan indikator hasil sebagai dasar akuntabilitas. Secara praktis, manajemen perlu memperlakukan program prioritas sebagai objek kinerja. Setiap program unggulan seyogyanya memiliki baseline, target, realisasi, dan evaluasi *outcome*. Indikator kepatuhan lingkungan juga perlu dipisahkan dari indikator pemberdayaan komunitas agar mutu kedua dimensi tidak dinilai dari kelengkapan daftar kegiatan semata. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya membedakan kewajiban menyusun laporan dari mutu substansi laporan. Regulasi TJSL dan keuangan berkelanjutan telah mendorong pelaporan; tahap berikutnya adalah mendorong keterukuran dampak.

Penelitian ini terbatas pada satu perusahaan, satu tahun, dan data sekunder. Temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh BUMN atau industri pupuk. Analisis isi juga tidak memverifikasi pelaksanaan di lapangan, sehingga absennya outcome dalam laporan tidak serta-merta berarti program tidak berdampak. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan laporan multi tahun, menambahkan wawancara pengelola TJSL dan penerima manfaat, atau menghubungkan kualitas pengungkapan dengan alokasi anggaran dan indikator kinerja organisasi. Perbandingan dengan

perusahaan sejenis dalam holding industri pupuk juga berpeluang menajamkan apakah ketimpangan substansi bersifat idiosinkratik atau pola sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Brammer, S., Pavelin, S., 2008. Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 17(2), 120–136. <https://doi.org/10.1002/bse.506>
- Carroll, A. B., 1991. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Clarkson, P. M., Li, Y., Richardson, G. D., Vasvari, F. P., 2008. Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: An empirical analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 33(4–5), 303–327. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.05.003>
- Deegan, C., 2002. Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Elkington, J., 1997. *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.
- Freeman, R. E., 1984. *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Global Reporting Initiative. 2021. GRI standards. Global Reporting Initiative.
- Gunawan, J., Permatasari, P., Fauzi, H., 2022. The evolution of sustainability reporting practices in Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 358, 131798. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131798>
- Hahn, R., Kühnen, M., 2013. Determinants of sustainability reporting: A review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5–21. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005>
- Hidayati, I., 2023. Sustainability reporting in Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(2). <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i2.319>
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2021. *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438). <https://jdih.bumn.go.id>
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2023. *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 261). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Krippendorff, K., 2018. *Content analysis: An introduction to its methodology*, 4th ed. Sage.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6103). <https://peraturan.go.id>
- Porter, M. E., Kramer, M. R., 2011. Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- PT Petrokimia Gresik. 2024. *Laporan keberlanjutan 2024*. PT Petrokimia Gresik.
- Sebrina, N., Taqwa, S., Afriyenti, M., Septiari, D., 2023. Analysis of sustainability reporting quality and corporate social responsibility on companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *Cogent Business & Management*, 10(1), Article 2157975. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2157975>
- Suchman, M. C., 1995. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- United Nations. 2015. *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1)*. United Nations.